

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2010 - 2015**

**Ingra Sovita, Enny Arita dan Mailinarti  
Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas**

**Abstract**

*The purpose of this study to analyze the influence of local tax revenue to the Local Revenue West Sumatra province in 2010 - 2015. Type a descriptive quantitative research data. Data collection techniques used documentation studies and surveys using secondary data such as time series data obtained through library research and then processed with descriptive statistics. The dependent variable revenue (Y) and the motor vehicle tax-free variable (X). Before the data is processed first performed classical assumption in the form of normality test. Hypothesis testing using t test partially with significance level of 5% and a coefficient determination. The results showed that the original income and taxes are normally distributed by Kolmogorov Smirnov. Local tax revenue correlates strongly with revenue (0.777) and R-square value of 0.604. T test results showed that the significant effect on the local tax Local Revenue West Sumatra province with the regression equation  $Y = 1,539E11 + 0.379 X + e$ .*

*Keywords : local tax revenue ; locally-generated revenue*

**PENDAHULUAN**

Pajak salah sumber penerimaan yang memiliki kontribusi terpenting bagi negara karena pajak dapat menentukan kelancaran pembangunan suatu negara maupun daerahnya. Berdasarkan wewenang pemungutannya pajak digolongkan atas pajak pusat dan pajak daerah. Tujuan penggolongan pajak dimaksudkan agar tidak terjadi kekacauan dalam proses pemungutan pajak karena hirarki pemerintahan di Indonesia terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dibagi menjadi pemerintah propinsi dan kabupaten/ kota juga agar tiap pihak bertanggung jawab atas pemungutan pajaknya masing-masing dan tidak mencampuri pemungutan pajak yang menjadi kewenangan dari pihak lain.

Setelah pemerintah pusat mengeluarkan UU No.22 tahun 1999 diperbaharui dengan UU No.34 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah fokus pada otonomi daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah maka Pemerintah Daerah diberi kekuasaan lebih besar untuk mengatur keuangan daerahnya. Untuk mendukung otonomi yang maksimal pemerintah mengeluarkan kebijakan dibidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalan dana mobilisasi sumber-sumber daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran PAD dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam membiayaan dan penyelenggaraan pembangunan. Pajak daerah merupakan salah satu faktor penentu tingkat PAD. Fungsi-fungsi pemerintahan daerah seperti pengaturan, pelayanan dan pemberdayaan dapat dilaksanakan secara efektif

bila kemampuan fiskal atau pajak dari daerah dikelola dengan baik. Berarti bila PAD makin meningkat setiap tahun maka akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana dari pusat dan juga daerah semakin leluasa dalam membelanjakan penerimaan sesuai prioritas pembangunan daerah. Kemampuan pajak daerah dapat diukur setiap tahun melalui APBD.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam berarti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab yaitu otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian utama dari tujuan nasional (Darise, 2009). Kewenangan dalam urusan keuangan daerah memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang ada menyebabkan pemerintah daerah berusaha menggali sumber-sumber perekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah. Salah satunya pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah dimana tentang pajak daerah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing dengan mengingat kemampuan daerah dalam penarikan pajak untuk penerimaan daerah (Ayuningtiyas, 2008).

Untuk menyelenggarakan pemerintahannya daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No.28 tahun 2009 berbentuk pajak daerah. Salah satu pajak yang sangat besar pengaruhnya terhadap pemasukan kas daerah adalah pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu pajak propinsi yang diatur dalam Peraturan Daerah No.5 tahun 2011 . Pajak daerah selalu mengalami masalah antara target dan realisasi yang penerimaannya diimbangi dengan efektifitas, kontribusi dan potensi dalam proses pemungutannya sebagai komponen PAD propinsi Sumatera Barat seperti tabel 1 memperlihatkan target dan realisasi pendapatan daerah propinsi Sumatera Barat tahun 2010 – 2015.

**Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Barat**

Tahun	Target	Realisasi	
		Rp	%
2010	1.157.286.889.000	1.281.399.815.356	110.72
2011	1.561.962.527.255	1.727.432.663.925	110.59
2012	1.543.438.605.781	2.026.241.165.035	131.28
2013	1.849.528.914.910	1.920.971.382.917	103.86
2014	2.071.161.195.841	2.183.958.892.494	105.45
2015	2.823.807.882.000	2.818.335.413.347	99.81
Rata-Rata	1.834.531.002.465	1.993.056.555.512	110.29

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Tahun 2015

Berdasarkan tabel 1 di atas selama 6 tahun berturut-turut realisasi penerimaan pendapatan daerah melebihi target yang sudah ditetapkan kecuali tahun 2012 realisasi tidak sesuai dengan target sebesar 99,81% dan rata-rata pendapatan daerah target Rp 1.834.531.002,465 dan realisasi Rp 1.993.056.555,512 (110,29%). Untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat maka pemerintah daerah perlu meningkatkan PAD yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut

berdasarkan peraturan yang berlaku. Target dan realisasi PAD propinsi Sumatera Barat tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

**Tabel 2. Target dan Realisasi PAD Propinsi Sumatera Barat**

Tahun	Target	Realisasi	
		Rp	%
2010	491.315.593.000	571.607.519.378	116,34
2011	636.224.684.255	794.300.186.403	124,85
2012	737.857.852.781	739.454.680.779	100,22
2013	946.564.523.820	1.006.820.947.269	106,37
2014	1.147.303.769.956	1.224.414.657.998	106,72
2015	1.137.692.342.000	1.121.219.295.862,2 4	98,55
Rata-Rata	849.493.127.635	722.766.331.971,17	130,61

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Tahun 2015.

Berdasarkan tabel 2 di atas terlihat bahwa realisasi PAD mampu melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya kecuali tahun 2015 ( 98,55%) rata-rata 130,61%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PAD propinsi Sumatera Barat semakin baik sebagai hasil usaha pemerintah demi terwujudnya kemandirian daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) propinsi Sumatera Barat yang memungut pajak daerah terdiri dari 17 lokasi UPTD yang tersebar pada berbagai kabupaten dan kota. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor sebagai salah satu komponen pajak daerah akhir-akhir ini cukup pesat karena perekonomian masyarakat semakin meningkat juga karena begitu mudahnya persyaratan mendapat kredit pembelian kendaraan bermotor. Masyarakat lebih cenderung memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada angkutan umum dalam menjalankan aktivitasnya. Selain itu selera masyarakat juga berubah - rubah dalam memiliki kendaraan bermotor sehingga memudahkan perpindahan kepemilikan antara satu pihak dengan pihak lain. Jika hal ini terus berlangsung maka akan berdampak pada pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah penelitian ini adalah : Apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD propinsi Sumatera Barat tahun 2010 – 2015. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap PAD propinsi Sumatera Barat tahun 2010 – 2015.

Hipotesis penelitian yang diajukan diduga penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah propinsi Sumatera Barat tahun 2010 – 2015.

## **METODE PENELITIAN**

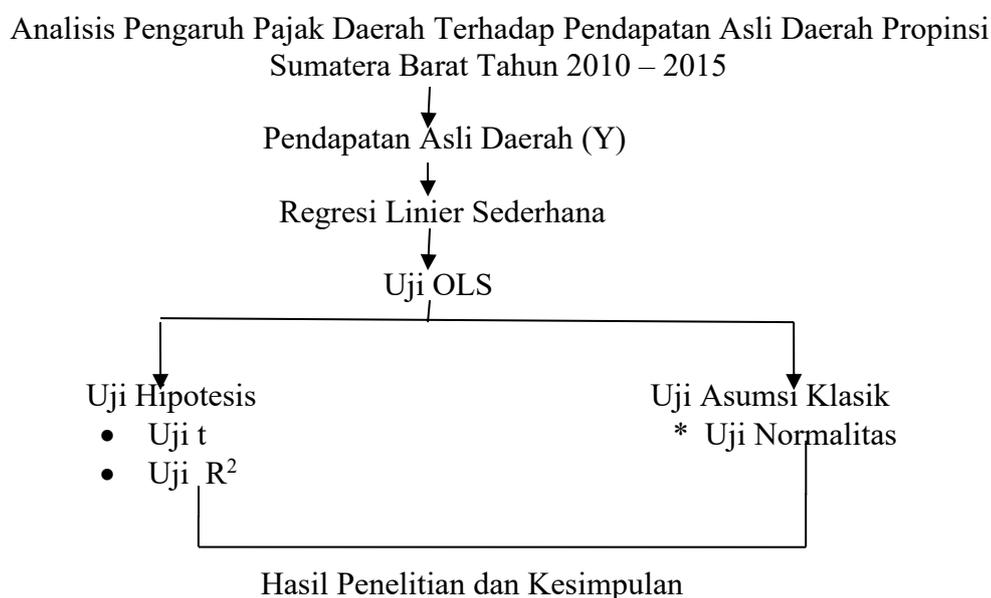
Tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : a) mengidentifikasi latar belakang masalah penelitian, b) merumuskan masalah dan menentukan tujuan penelitian, c) mengumpulkan informasi tentang pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah, d) melakukan analisis data dan mengolahnya melalui data dan informasi yang diperoleh dari instansi pemerintahan yang bersangkutan, e) mengambil kesimpulan logis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta member saran pada instansi yang bersangkutan.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah propinsi Sumatera Barat. Variabel penelitian terdiri dari variabel terikat (Y) adalah Pendapatan Asli Daerah dan variabel bebas (X) adalah pajak daerah (X) dengan definisi

operasional variabel penelitian sebagai berikut : PAD (Y) adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha Pemerintah Daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah dan lain-lain PAD yang syah. Pajak daerah (X) adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor.

Model penelitian merupakan serangkaian teori berupa gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan alternatif solusi dari serangkaian masalah penelitian yang dihadapi. Model penelitian tentang pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2010– 2015 dapat dilihat pada gambar 1. berikut :

**Gambar 1. Model Penelitian**



Rancangan penelitian merupakan rencana pengelolaan data untuk menjawab permasalahan dan kerangka kerja untuk merinci hubungan antara variabel. Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian eksperimental dan observasi. Penelitian eksperimental dianggap unik karena dilihat dari tujuan penelitian penelitiannya merupakan satu-satunya bentuk penelitian yang mencoba untuk mempengaruhi sebagian / semua variabel dan menguji hipotesis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Rancangan penelitian eksperimental terdiri dari studi dokumentasi sedangkan rancangan penelitian observasi terdiri dari statistik deskriptif dan statistik inferensial yang bertujuan untuk mencapai tujuan penelitian dengan menggunakan data berkala (*time series*) tahun 2010 – 2015.

- Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut
- 1) Studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan mempelajari, menelaah dan mengutip dari berbagai buku literature dan peraturan perundang-undangan berlaku yang berhubungan dengan masalah penelitian.
  - 2) Studi lapangan dengan wawancara dan observasi guna mendapatkan data primer.

- 3) Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan sesuai tujuan penelitian.
- 4) Wawancara yaitu proses tanya jawab dengan pihak-pihak terkait seperti pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah propinsi Sumatera Barat.
- 5) Time series analisis yaitu melihat pengukuran dari waktu ke waktu tertentu dengan melihat frekwensi, persentase kecenderungan dari suatu kejadian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu analisis yang mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis data angka agar dapat memberikan gambaran tentang keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Sebelum data penelitian dianalisis terlebih dahulu dilakukan uji instrumen berupa uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan menentukan nilai *asimp.sig* (2 tailed). Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan rumus  $Y = a + bX + e$  dimana  $Y$  = variabel terikat (PAD),  $a$  = konstanta,  $b$  = koefisien regresi variabel bebas (pajak daerah),  $X$  = variabel bebas (pajak daerah) dan  $e$  = *error term*

Pengujian hipotesis menggunakan analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur kemampuan model menerangkan variabel terikat (Ghozali, 2005) bernilai 0 – 1. Jika nilai  $R^2$  mendekati satu berarti variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat. Kelemahan mendasar  $R^2$  setiap tambahan satu variabel bebas maka  $R^2$  pasti meningkat apakah berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat sehingga dianjurkan menggunakan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* saat mengevaluasi model regresi yang terbaik. Nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* dapat naik atau turun bila satu variabel bebas ditambahkan ke dalam model.

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan kriteria jika angka probabilitas signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak dan jika angka probabilitas signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan daerah propinsi Sumatera Barat yang dimaksudkan adalah pajak daerah pada tahun anggaran 2010 – 2014 berupa target pajak daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah propinsi Sumatera Barat dimana selama 6 tahun relatif mengalami kenaikan cukup signifikan kecuali tahun anggaran 2015 relatif mengalami penurunan sebesar Rp 1,636675626 x 10<sup>12</sup>. Selama tahun anggaran 2010 – 2015 target rata-rata pendapatan daerah propinsi Sumatera Barat sebesar Rp 1.834.531.002.465. Kenaikan yang cukup signifikan ini ditunjang oleh penerimaan pajak daerah berupa penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang diserahkan kepada kabupaten / kota sebesar 30%. Sedangkan realisasi pendapatan daerah propinsi Sumatera Barat setiap tahunnya berfluktuasi dimana tahun anggaran 2010 – 2012 relatif rata-rata mengalami kenaikan Rp 1,678357881 x 10<sup>12</sup> atau 117,53% sedangkan tahun anggaran 2013 realisasinya mengalami penurunan sebesar Rp 1.05269783 x 10<sup>11</sup> (27,42%). Kemudian tahun anggaran 2014 dan tahun 2015 realisasi pendapatan daerah kembali mengalami kenaikan lagi sebesar Rp 6,34376521 x 10<sup>11</sup> (5,64%). Secara rata-rata realisasi pendapatan daerah propinsi Sumatera Barat sebesar Rp 1.993.056.555.512 (110,29%).

Target PAD propinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2010 – 2014 selalu mengalami kenaikan cukup signifikan dengan target rata-rata Rp  $7,918572845 \times 10^{11}$  sedangkan pada tahun anggaran 2015 target PAD mengalami penurunan sebesar Rp 9.611.427.000,-. Sedangkan realisasi PAD propinsi Sumatera Barat setiap tahunnya selalu berfluktuasi dimana realisasi PAD tahun 2010 – 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp  $2,226926671 \times 10^{11}$  (8,51%) pada tahun anggaran 2012 realisasi PAD mengalami penurunan sebesar Rp  $5,48455057 \times 10^{10}$  (24,63%). Tahun anggaran 2012 – 2014 realisasi PAD propinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan rata-rata Rp  $6,88230095 \times 10^{11}$  (104,44%). Tahun anggaran 2015 realisasi PAD propinsi Sumatera Barat kembali mengalami penurunan sebesar Rp  $1,03195362 \times 10^{11}$  (8,17%). Secara rata – rata tahun anggaran 2010 – 2015 realisasi PAD propinsi Sumatera Barat Rp 722.766.331.971,17 (130,61%).

Uji statistik yang digunakan berupa uji normalitas dan uji korelasi. Uji normalitas data sebaiknya dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Normalitas data dalam penelitian ini dapat dilihat dari nilai One Sample Kolmogorov Smirnov Test. Interpretasi *output* Kolmogorov Smirnov bertujuan untuk mengetahui apakah data sampel pada variabel Pendapatan Asli Daerah propinsi Sumatera Barat selama 6 tahun (2010 – 2015) terdistribusi secara normal dengan menggunakan  $\alpha = 5\%$  dengan hipotesis yang diusulkan untuk variabel terikatnya sebagai berikut :  $H_0 =$  data variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) propinsi Sumatera Barat terdistribusi secara normal  $H_A =$  data variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) propinsi Sumatera Barat tidak terdistribusi secara normal

*Output* SPSS Kolmogorov Smirnov menunjukkan bahwa jumlah sampel pada kolom N selama 6 tahun dengan nilai rata-rata PAD propinsi Sumatera Barat sebesar Rp  $9,10 \times 10^1$  dan standar deviasi sebesar Rp  $2,489 \times 10^{11}$ . Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis jika hipotesis nol ( $H_0$ ) yang diusulkan untuk variabel terikat dan variabel bebas adalah sebagai berikut :  $H_0$  diterima jika nilai *p value* pada kolom *asimp.sig(2-tailed)*  $>$  *level of significant*.  $H_0$  ditolak jika nilai *p value* pada kolom *asimp.sig (2 tailed)*  $<$  *level of significant*. Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis alternatif ( $H_A$ ) yang diusulkan untuk variabel terikat dan variabel bebas adalah sebagai berikut :  $H_A$  diterima jika nilai *p value* pada kolom *asimp.sig (2 tailed)*  $<$  *level of significant*.  $H_A$  ditolak jika nilai *p value* pada kolom *asimp.sig (2 tailed)*  $>$  *level of significant*. *Output* SPSS Kolmogorov Smirnov menunjukkan nilai *asimp.sig (2 tailed)*  $0,991 > 0,05$  *level of significant* berarti hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima dan hipotesis alternatif ( $H_A$ ) ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa data Pendapatan Asli Daerah propinsi Sumatera Barat selama 6 tahun terdistribusi secara normal. Untuk variabel bebasnya (pajak daerah) hipotesis yang diusulkan adalah sbb :  $H_0 =$  data variabel pajak daerah propinsi Sumatera Barat terdistribusi secara normal dan  $H_A =$  data variabel pajak daerah propinsi Sumatera Barat tidak terdistribusi secara normal

*Output* SPSS Kolmogorov Smirnov menunjukkan jumlah sampel pada kolom N selama 6 tahun dengan nilai rata-rata pajak daerah propinsi Sumatera Barat sebesar Rp  $1,99 \times 10^{12}$  dan standar deviasi sebesar Rp  $5,10 \times 10^{11}$ . Berdasarkan pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis nol ( $H_0$ ) dan menerima atau menolak hipotesis alternatif ( $H_A$ ) terlihat bahwa *output* SPSS Kolmogorov Smirnov nilai *asimp.Sig (2 tailed)*  $0,450 > 0,05$  *level of significant* berarti hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima dan hipotesis alternatif ( $H_A$ ) ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa data pajak daerah propinsi Sumatera Barat selama 6 tahun terdistribusi secara normal.

Uji korelasi bertujuan untuk menguji hubungan antara dua variabel yang tidak menunjukkan hubungan fungsional (berhubungan bukan berarti disebabkan). Uji korelasi tidak membedakan jenis variabel (tidak ada variabel terikat dan variabel bebas). Keeratan hubungan ini dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi. Uji korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji korelasi Spearman karena memenuhi asumsi statistik non parametrik.

Nilai koefisien korelasi merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur kekuatan (keeratan) hubungan antar variabel. Koefisien korelasi memiliki nilai antara -1 sampai +1 dengan sifat nilai koefisien korelasi plus (+) atau minus (-) yang menunjukkan arah korelasi dengan makna sifat korelasinya sebagai berikut :

- Korelasi positif (+) berarti jika variabel bebas X1 mengalami kenaikan maka variabel bebas X2 juga akan mengalami kenaikan dan sebaliknya jika variabel bebas X2 mengalami kenaikan maka variabel bebas X1 juga akan mengalami kenaikan.
- Korelasi negatif (-) berarti jika variabel bebas X1 mengalami kenaikan maka variabel bebas X2 akan mengalami penurunan atau jika variabel bebas X2 mengalami kenaikan maka variabel bebas X1 akan mengalami penurunan.

Sifat korelasi akan menentukan arah dari korelasi. Koefisien korelasi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 0 – 0,20 berarti korelasi memiliki keeratan sangat lemah
- 0,21 – 0,40 berarti korelasi memiliki keeratan lemah
- 0,41 – 0,70 berarti korelasi memiliki keeratan kuat
- 0,71 – 0,90 berarti korelasi memiliki keeratan sangat kuat
- 0,91 – 0,99 berarti korelasi memiliki keeratan sangat kuat sekali
- 1 berarti korelasi sempurna

Hipotesis nol atau hipotesis alternatif yang akan diusulkan dan akan diuji secara korelasi adalah sebagai berikut :  $H_0$  = pajak daerah propinsi Sumatera Barat tidak berkorelasi dengan Pendapatan Asli Daerah propinsi Sumatera Barat,  $H_A$  = pajak daerah propinsi Sumatera Barat berkorelasi dengan Pendapatan asli Daerah propinsi Sumatera Barat. Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis jika menggunakan hipotesis nol ( $H_0$ ) yang diusulkan adalah sebagai berikut :  $H_0$  diterima jika  $r$  hitung  $< r$  tabel atau  $p$  value pada kolom *sig (2 tailed)*  $> level\ of\ significant$ .  $H_0$  ditolak jika  $r$  hitung  $\geq r$  tabel atau nilai  $p$  value pada kolom *sig (2 tailed)*  $< level\ of\ significant$ . Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis jika menggunakan hipotesis alternatif yang diusulkan adalah sebagai berikut :  $H_0$  diterima jika  $r$  hitung  $\geq r$  tabel atau nilai  $p$  value pada kolom *sig (2 tailed)*  $< level\ of\ significant$ .  $H_0$  ditolak jika  $r$  hitung  $< r$  tabel atau nilai  $p$  value pada kolom *sig (2 tailed)*  $> level\ of\ significant$ . Output SPSS diinterpretasikan dari tabel *correlations* dengan tingkat signifikansi 5% *sig (2 tailed)* sebagai berikut : Koefisien korelasi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah propinsi Sumatera Barat selama 6 tahun sebesar 0,777 berarti keeratan korelasi pajak daerah dengan Pendapatan Asli Daerah propinsi Sumatera Barat kuat. Nilai  $p$  value pada kolom *sig (2 tailed)* 0,069  $> 0,05$  *level of significant* berarti  $H_A$  diterima dan  $H_0$  ditolak artinya keeratan korelasi pajak daerah dengan Pendapatan Asli Daerah propinsi Sumatera Barat selama 6 tahun sangat kuat. Secara spesifik jika pajak daerah mengalami kenaikan maka Pendapatan Asli Daerah juga akan mengalami kenaikan atau jika Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan maka pajak daerah juga akan mengalami kenaikan.

Analisa regresi bertujuan untuk menguji pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain. Variabel yang dipengaruhi disebut variabel tergantung sedangkan variabel

yang mempengaruhi disebut variabel bebas. Regresi yang memiliki satu variabel terikat dan satu variabel bebas disebut regresi sederhana. *Output* SPSS regresi sederhana hasil penelitian ini adalah  $Y = 1,539 \times 10^{11} + 0,379X + e$  dengan interpretasi datanya sebagai berikut : Jika pajak daerah dianggap konstan maka Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp  $1,539 \times 10^{11}$ . Jika pajak daerah naik sebesar Rp 1 maka Pendapatan Asli Daerah akan naik sebesar Rp 3,79.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Dalam *output* SPSS koefisien determinasi terletak pada tabel *summary*<sup>b</sup> ditulis *R Square*.. Nilai *R Square* disebut baik jika di atas 0,5 karena nilai *R Square* berkisar antara 0 – 1. Pada umumnya sampel dengan data deret waktu (*time series*) memiliki nilai *R Square* cukup tinggi ( di atas 0,5). *Output* SPSS hasil penelitian memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 0.604 artinya 60,4% variabel terikat Pendapatan Asli Daerah dijelaskan oleh variabel bebas pajak daerah dan sisanya 39,6% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi linier sederhana dapat digunakan untuk penelitian ini karena sebagian besar variabel terikat dijelaskan oleh variabel bebas yang digunakan dalam model.

Berkaitan dengan uji yang dilakukan dalam uji regresi yang dilakukan secara parsial dengan *t test* maka hipotesis alternatif ( $H_A$ ) yang diusulkan dalam uji regresi linier sederhana adalah sebagai berikut :  $H_0$  = diduga pajak daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah propinsi Sumatera Barat dan  $H_A$  = diduga pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah propinsi Sumatera Barat. Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis jika hipotesis nol ( $H_0$ ) yang diusulkan adalah sbb :  $H_0$  diterima jika  $t$  hitung <  $t$  tabel atau nilai *p value* pada kolom *sig.* > *level of significant* dan  $H_0$  ditolak jika  $t$  hitung  $\geq$   $t$  tabel atau nilai *p value* pada kolom *sig.* < *level of significant*. Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis jika hipotesis alternatif ( $H_A$ ) yang diusulkan adalah :  $H_A$  diterima jika  $t$  hitung  $\geq$   $t$  tabel atau nilai *p value* pada kolom *sig.* < *level of significant* dan  $H_A$  ditolak jika  $t$  hitung <  $t$  tabel atau nilai *p value* pada kolom *sig.* > *level of significant*.

Uji *t* bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hasil uji ini pada *output* SPSS dapat dilihat pada tabel *coefficients*<sup>a</sup>. Nilai dari uji *t test* dapat dilihat dari *p value* (pada kolom *sig*) pada masing-masing variabel bebas. Jika *p value* lebih kecil dari *level of significant* yang ditentukan atau  $t$  hitung ( pada kolom *t*) lebih besar dari  $t$  tabel (dihitung dari *two tailed*  $\alpha = 5\%$ , *df-k*). *Output* SPSS analisis tabel *coefficients* untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat adalah : variabel pajak daerah memiliki nilai *p value*  $0,069 < 0,05$  artinya signifikan sehingga hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak daerah secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah propinsi Sumatera Barat

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : data penelitian berupa pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah propinsi Sumatera Barat selama 6 tahun terdistribusi secara normal berdasarkan nilai *output* SPSS Kolmogorov Smirnov. Pajak daerah berkorelasi sangat kuat dengan Pendapatan Asli Daerah propinsi Sumatera Barat selama 6 tahun dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,777. Pendapatan Asli Daerah propinsi Sumatera Barat selama 6 tahun hanya dipengaruhi oleh pajak daerah sebesar 60,4% sedangkan sisanya 39,6% dipengaruhi oleh faktor lain

yang tidak termasuk ke dalam model penelitian. Hasil uji t test secara parsial pada tingkat signifikansi 95% menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah propinsi Sumatera Barat selama 6 tahun. Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini untuk penelitian berikutnya adalah sebagai berikut : 1) agar jumlah data penelitian untuk Pendapatan Asli Daerah dan pajak daerah propinsi Sumatera Barat dapat ditambahkan lagi bukan hanya selama 6 tahun saja agar hasil penelitian nantinya tidak bias, 2) agar data Pendapatan Asli Daerah dan pajak daerah dapat diambil untuk berbagai propinsi, kabupaten atau kota yang ada di Indonesia, 3) agar variabel bebas penelitian berupa pajak daerah dapat ditambahkan lagi dengan beberapa variabel bebas lainnya yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah propinsi Sumatera Barat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Dini. 2010. *Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman*. Thesis Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ayuningtiyas, Arniyanti. 2008. *Analisis Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Anggaran Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Seluruh Kabupaten Di Propinsi Jawa Tengah)*. Skripsi FEIS UIN Jakarta.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : PT Indeks
- Fidel. 2007. *Pembahasan Undang-Undang No.28/2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta : Amparo's Publishing.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi dan Analisis Multivariate Dengan Proses SPSS*. Universitas Diponegoro Semarang..
- Lestari, Tanjung. 2010. *Analisis Kontribusi dan Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Penerimaan PAD Kota Bogor*. Skripsi IPB.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mayasari, Dian. 2009. *Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Analisis Terhadap Kabupaten dan Kota Di Jawa Timur)*. Skripsi FE UMM.
- Pemerintah Republik Indonesia. *UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *UU No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *UU No.28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 7 Buku 1*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Riduansyah, Muhammad. 2003. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD dan APBD Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintahan Daerah Kota Bogor)*. Makara, Sosial Humaniora Vol.7 No.2
- Saleh, Mukhlis. 2012. *Analisis Penerapan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Gorontalo*. Skripsi Universitas Negeri Gorontalo.
- Sidik, Muhammad. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : FEB UGM

- Waluya Jati, Ahmad. 2010. *Peranan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD (Studi Kasus Daerah Tingkat II Di Jawa Timur)*. Jurnal Balance Vol.3.
- Zuraida, Ida. 2014. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika.